

**TESIS**  
**EVALUASI PELAKSANAAN BIMBINGAN CALON PENGANTIN**  
**BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER**  
**(STUDI KASUS DI KECAMATAN POLOMBANGKENG UTARA**  
**KABUPATEN TAKALAR)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD RIZAL**

**P072171003**



**PROGRAM STUDI JENDER DAN PEMBANGUNAN**  
**SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2020**

**EVALUASI PELAKSANAAN BIMBINGAN CALON PENGANTIN  
BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN POLOMBANGKENG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR)**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi**

Jender dan Pembangunan

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD RIZAL**

**Kepada**

**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

**2020**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

EVALUASI PELAKSANAAN BIMBINGAN CALON PENGANTIN  
BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER ( STUDI KASUS DI  
KECAMATAN POLOMBANGKENG UTARA KABUPATEN  
TAKALAR)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD RIZAL

P072171003

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Jender dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada tanggal 23 Desember 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

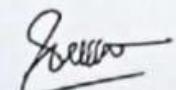
Pembimbing Pendamping,

  
Prof. dr. Veni Hadju, M.Sc., Ph.D  
Nip. 19620318 198803 1 004

  
Dr. dr. Citrakusumasari, M.Kes., Sp.GK  
Nip. 19630318 199202 2 001

Ketua Program Studi,

Rektor Sekolah Pascasarjana

  
Prof. Dr. Nursini, SE., MA  
Nip. 196607171991032001

  
Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc  
Nip. 19670308 1990031001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal  
NIM : P072171003  
Program Studi : Jender dan Pembangunan  
Jenjang : S2

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

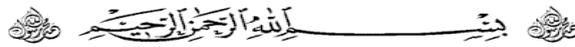
Makassar, 18 Januari 2020

Yang menyatakan



( Muhammad Rizal )

## PRAKATA



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan **Tesis dengan judul** adalah “**Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Kasus Di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar)** ” yang disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan syarat dalam memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) dalam bidang Gender dan Pembangunan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan tesis ini terdapat berbagai macam hambatan dan tantangan, namun semuanya dapat teratasi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta bantuan, bimbingan, kritikan dan saran dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dan penyelesaian penelitian ini. Terimakasih kepada kedua orangtua penulis **Abdul Latief** dan **Sitti Habbasiah** atas cinta, kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa'anya yang menghantarkan penulis hingga sampai ke tahap ini.

Ucapan terima kasih dari lubuk hati yang dalam penulis haturkan kepada **Prof. dr. Veni Hadju, M.Sc., Ph.D** sebagai Ketua Komisi

Penasihat dan Ibu **Dr.dr.Citrakesumasari.M.Kes.,Sp.GK** sebagai Anggota Komisi Penasihat yang senantiasa memberikan arahan, dorongan dan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dewan penguji yang terhormat atas masukan, saran dan koreksinya dalam pembuatan tesis ini yakni, Bapak **Prof. Dr. Supriadi Hamdat,MA**, Ibu **Dr. Ery Iswari, M.Hum** dan Ibu **Dra. Herawati Abbas,M.Hum.MA,Ph.D.** Semoga apa yang diberikan akan dibalas oleh yang maha kuasa dengan limpahan rahmat dan karuniaNya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar–besarnya penulis sampaikan pula pada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
3. Prof Dr. Nursini,SE.,MA selaku Ketua Program Studi Jender dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Bapak dan Ibu Dosen Prgoram Studi Jender dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Unhas yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

5. Kak Ida dan seluruh staf pegawai Sekolah Pascasarjana Unhas atas segala arahan dan bantuan yang diberikan selama penulis menyelesaikan tugas akhir.
6. Teman-teman staff Departemen Gizi FKM Unhas atas segala dukungan untuk penulis.
7. Teman-teman Jender dan pembangunan angkatan 2017 Pascasarjana Unhas atas segala saran, kritik, doa dan dukungannya selama ini. Semoga pihak yang membantu dalam penulisan Tugas Akhirmendapatkan pahala oleh Allah SWT Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan membacanya dan mempelajarinya.

Makassar, Desember 2020

Penulis

## ABSTRAK

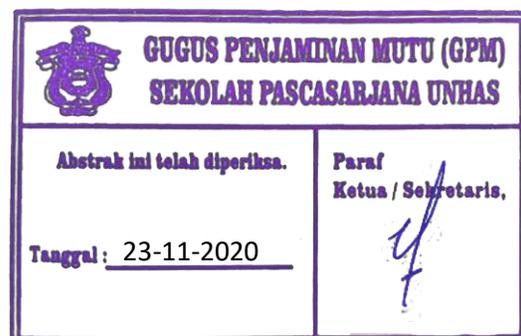
**MUHAMMAD RIZAL** *Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Kasus Di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar)* (dibimbing oleh **Veni Hadju** dan **Citrakesumasari**)

Banyaknya permasalahan rumah tangga yang terjadi menjadi acuan diadakannya program bimbingan calon pengantin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan bimbingan calon pengantin terutama materi berspektif gender yang diberikan saat pembimbingan pada calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Polombangkeng Utara, Takalar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan informan sebanyak 13 orang menggunakan metode snowball sampling yang mewakili KUA, pasangan yang telah melaksanakan bimbingan, puskesmas, dan imam desa. Pengumpulan informasi menggunakan metode wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan dengan analisis data tematik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA dilakukan hanya dalam sehari termasuk imunisasi tetanus. Adapun materi yang diberikan hanya selebar kertas berisi doa-doa suami istri. Studi ini menyarankan agar materi terkait kesetaraan gender dalam peran rumah tangga dan masalah kesehatan seperti screening malnutrisi dan anemia dapat pula diberikan. Selain itu, materi yang diberikan oleh petugas pemberi bimbingan sebaiknya dibuat dalam bentuk digital yang dapat dipelajari kembali setelah mendapatkan bimbingan di kantor KUA.

**Kata Kunci:** *bimbingan calon pengantin, gender, calon pengantin*



## ABSTRACT

**MUHAMMAD RIZAL.** *Evaluation of the Implementation of Bridegroom Guidance Based on a Gender Perspective (A Case Study in Polombangkeng Utara District, Takalar Regency)* (Supervised by **Veni Hadju** and **Citrakesumasari**)

The number of household problems that occur is a reference for the holding the bride and the groom guidance program. This research aims at exploring the extent of the implementation of the guidance for the bride and the groom based on a gender perspective review, especially the materials given when providing the guidance. This research was carried out at the office of religious affairs (KUA) North Polombangkeng, Takalar.

This research used a qualitative research method with 13 informants using a snowball sampling method representing the KUA, couples who had got the guidance, community health center, and village priests. The information obtained was done through interview, observation, and document review. The data were analyzed by applying a thematic data analysis.

The result shows that the implementation of the guidance for the bride and the groom to be at the KUA is carried out in a single day including giving them a tetanus immunization. The material is only a piece of paper containing husband and wife invocation. It is suggested that the additional material related to gender equality in household roles and health problems such as screening for malnutrition and anemia can also be given. In addition, the materials provided by the guidance officer should be made into a digital form which can be learnt by the couple after receiving guidance at the KUA office

**Keywords:** *bride and groom guidance, gender, bride and groom*

 <b>GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS</b>	
<b>Abstrak ini telah diperiksa.</b> 23-11-2020	<b>Paraf</b> Ketua / Sekretaris,
<b>Tanggal :</b> _____	

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	2
<b>ABSTRAK</b> .....	1
<b>ABSTRACT</b> .....	2
<b>BAB I</b> .....	6
<b>PENDAHULUAN</b> .....	6
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	6
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	17
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	17
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	18
<b>1.5 Sistematika penelitian</b> .....	18
<b>BAB II</b> .....	20
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	20
<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Pra-Nikah</b> .....	20
<b>2.1.1 Pendidikan konseling pra-nikah</b> .....	20
<b>2.1.2 Pendidikan Pra-nikah Berdasarkan Aspek Kesehatan (Preconception care)</b> .....	23
<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Gender</b> .....	25
<b>2.3 Pengertian Evaluasi Program dan Penelitian Kualitatif</b> .....	30
<b>2.3 Formatif-Summatif Evaluation Model</b> .....	37
<b>2.4 Tinjauan Tentang Implementasi</b> .....	39
<b>2.6 Kerangka Teori</b> .....	44
<b>2.6.1 Teori Donabedian</b> .....	44
<b>2.7 Kerangka Konsep</b> .....	45
<b>BAB III</b> .....	48
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	48
<b>3.1 Rancangan Penelitian</b> .....	48
<b>3.2 Waktu dan Tempat Penelitian</b> .....	49
<b>3.2.1 Waktu Penelitian</b> .....	49
<b>3.2.2 Lokasi Penelitian</b> .....	49

3.3	Sumber Data.....	50
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.4.1	Wawancara.....	51
3.4.2	Pengamatan (Observasi).....	52
3.4.3	Telaah Dokumen dan Arsip.....	52
3.5	Alur Penelitian.....	53
<b>BAB IV .....</b>		<b>54</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>54</b>
4.1.	Hasil Penelitian .....	54
4.1.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
4.1.2.	Karakteristik Informan .....	55
4.1.3	Pelaksanaan Program Pendidikan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender .....	56
4.1.3.3.	Dana, sarana dan prasarana .....	59
4.1.3.4.	Metode pemberian bimbingan .....	61
4.1.3.5.	Materi pendidikan calon pengantin .....	61
4.1.4.	Proses .....	65
4.1.4.1.	Pertemuan dan pendaftaran catin (planning,orgainizing, actuating and controlling).....	65
4.1.4.2	Pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah .....	66
4.2	PEMBAHASAN .....	71
4.2.1	Input.....	71
4.2.1.1	SDM.....	71
4.2.1.2.	Sarana dan prasarana .....	72
4.2.1.2	Evaluasi Materi bimbingan calon pengantin.....	74
4.2.2	Proses .....	77
4.2.2.1	Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin.....	77
<b>BAB V .....</b>		<b>82</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>82</b>
5.1	Kesimpulan .....	82
5.1.1	Input.....	82

<b>5.2. Saran</b> .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	85
<b>Lampiran</b> .....	89

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam suatu kehidupan rumah tangga banyak permasalahan yang seringkali terjadi, baik itu dalam skala besar ataupun kecil. Hal itu pula yang membuat banyak fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat, mulai dari KDRT yang berujung dengan perceraian bahkan sampai kematian, sampai kurangnya kesadaran dan perhatian suami terhadap kondisi kesehatan pasangannya. Faktor budaya, pengetahuan, dan sikap yang bisa menimbulkan bias gender dalam membina rumah tangga menjadi salah satu penyebab fenomena tersebut terjadi. Oleh karena itu perlu perhatian khusus dari berbagai pihak untuk meminimalisir resiko permasalahan tersebut dari awal dengan diadakannya program bimbingan perkawinan atau pendidikan pra-nikah.

Secara umum pernikahan merupakan suatu fase hidup dimana dua orang insan di satukan dalam suatu ikatan untuk membina rumah tangga . Sementara dari segi agama Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan

oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.(A.R Gozali.2003)

Suatu perkawinan terdiri dari dua individu, meliputi pria sebagai suami dan wanita sebagai istri yang keduanya memiliki peran, keunikan dan adanya kemungkinan bahwa tujuan kedua individu itu tidak sama. Selain itu suami istri adalah dua insan yang berbeda hampir dalam segala hal.(Kertamuda, 2009)

Perkawinan merupakan ikatan yang berlangsung untuk selamanya sehingga hubungan suami istri perlu dipertahankan dan dipelihara. Dalam perkawinan, dua individu menjalani kehidupan bersama dimana seharusnya dapat saling memberi dukungan.. Banyak masalah yang di hadapi pasangan dalam membina rumah tangga, tingkat perceraian yang kebanyakan di sertai dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang familiar terjadi belakangan ini. Di Indonesia sendiri tingkat perceraian sendiri mencapai angka 374.516 pada tahun 2017.(BPS, 2018)

Dengan faktor ekonomi sebagai penyebab utama terjadinya perceraian tersebut, tidak adanya edukasi tentang pengelolaan ekonomi rumah tangga membuat beberapa pasangan berselisih paham sehingga perceraian menjadi jalan yang di ambil oleh beberapa pasangan tersebut. Penyebab terbesar tingginya angka perceraian adalah rendahnya

pengetahuan dan kemampuan suami istri mengelola dan mengatasi berbagai persoalan rumah tangga.

Ketidakmatangan (immaturity) pasangan suami-istri menghadapi kenyataan hidup yang sesungguhnya, mengakibatkan mereka kerap menemui kesulitan dalam melakukan penyesuaian atas berbagai permasalahan diusia perkawinannya yang masih “balita”. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kurangnya wawasan serta pengetahuan pasangan calon pengantin tentang membina rumah tangga yang baik menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian.(Damayanti, 2016)

Faktor kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab dari banyaknya angka perceraian yang terjadi jika tidak ada komunikasi lagi, maka akan menimbulkan permasalahan antara suami dan istri dan berujung pada perceraian serta menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga.(ZAKIYAH, 2018).

Di Indonesia sendiri data angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga mencapai 8.764 kasus pada tahun 2019.(Badan Pusat Statistik, 2019). Selain angka perceraian, angka kematian ibu (AKI) dan anak juga menjadi salah satu faktor yang mendorong perlu diadakannya suatu bimbingan untuk para calon pengantin yang akan menikah khususnya dalam konteks masalah kesehatan reproduksi serta gizi ibu/calon ibu. Angka

Kematian Ibu sendiri di Indonesia mencapai 305 per 100.000 kelahiran pada tahun 2015. (Indonesian Ministry of Health, 2018)

Masalah kesehatan ibu menjadi suatu titik balik yang harus di perhatikan dengan sangat serius. Angka kematian Ibu dan kematian neonatal perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak di berbagai ruang lingkup, mulai ruang lingkup individu, lingkungan keluarga, maupun lingkungan social. Angka kematian ibu sendiri menurut data WHO mencapai 830 ibu di dunia yang meninggal akibat penyakit terkait kehamilan dan persalinan .(Drife, 2018).

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi dan jauh berada di atas AKI negara ASEAN lainnya. Berdasarkan hasil laporan MDGs hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012 menunjukkan angka kematian ibu sebesar 359/ 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Menurut profil kesehatan Indonesia Tahun 2015 Angka Kematian Ibu di Indonesia sebesar 305/ 100.000 KH (Hasil Survei Penduduk Antar Sensus). (Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Selain Angka Kematian Ibu (AKI) Kematian Neonatal juga menjadi sesuatu hal yang perlu di tindak lanjuti, kematian Neonatal di dunia sendiri mencapai angka 7000 bayi meninggal dunia setiap harinya dan di indonesia sendiri mencapai angka 185/hari dengan AKN 15/1000 kelahiran hidup. Kematian neonatal berkaitan erat dengan kualitas pelayanan persalinan, dan

penanganan BBL yang kurang optimal segera setelah lahir dan beberapa hari pertama setelah lahir.(WHO. 2018).

Banyak penyebab yang mempengaruhi banyaknya Angka Kematian Ibu dan kematian neonatal. Penelitian dari Lestari menyatakan bahwa salah satu penyebab dari kematian ibu adalah anemia, dimana anemia sangat rentan diderita oleh ibu mengalami kehamilan diusia beresiko yaitu memiliki 1,8 kali kemungkinan mengalami anemia dibandingkan dengan ibu dengan kehamilan pada umur tidak beresiko. (Purwangingtyas and Prameswari, 2017).

Penelitian di kota semarang menunjukkan bahwa di kota Semarang ketersediaan ahli kandungan sangat minim di rumah sakit. Dokter ahli kandungan hanya tersedia 24 jam di rumah sakit dr. Kariadi dan rumah sakit Tugurejo, selain kedua rumah sakit tersebut dokter ahli kandungan hanya didatangkan saat dibutuhkan. Perlu kita tahu bahwa kesiapan rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kehamilan harus tanggap, cepat dan tepat. Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka kemungkinan secara langsung menjadi faktor eksternal penyebab kematian ibu. Survei awal menunjukkan bahwa suami terkadang acuh dengan pemeriksaan kesehatan ibu hamil.(Anggraini and Rahayu, 2017).

Peran suami juga berpengaruh terhadap meningkatnya angka kematian ibu ketidaktahuan akan komplikasi kehamilan yang mungkin bisa terjadi kemungkinan dapat menjadikan keterlambatan pengambilan

keputusan untuk mengakses pelayanan kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurmawati juga menyatakan bahwa beberapa suami acuh dan tidak mendukung dalam melakukan akses pelayanan kesehatan selama kehamilan.(Nurmawati and Indrawati, 2018).

Kematian bayi dapat pula diakibatkan dari kurangnya kesadaran akan kesehatan ibu. Banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya ibu jarang memeriksakan kandungannya ke tenaga kesehatan, hamil di usia muda, jarak yang terlalu sempit, hamil di usia tua, kurangnya asupan gizi bagi ibu dan bayinya, makanan yang dikonsumsi ibu tidak bersih, fasilitas sanitasi dan higienis yang tidak memadai (Fauziah, 2011). Selain itu kondisi ibu saat hamil yang tidak bagus dan sehat, juga dapat berakibat pada kandungannya seperti faktor fisik, faktor psikologis, faktor lingkungan, sosial dan budaya.(Sulistyawati, 2009)

Dari beberapa informasi di atas dapat disimpulkan bahwa selain faktor internal seperti penyakit dan kondisi fisik dari ibu hamil yang menyebabkan resiko kematian ibu dan kematian neonatal, terdapat pula faktor eksternal seperti ketersediaan fasilitas dan tingkat kepedulian suami terhadap kondisi istrinya. Tingkat pengetahuan tentang cara merawat dan menjaga ibu hamil untuk suami sangat perlu di kembangkan salah satunya melalui program-program bimbingan yang di dapatkan pada saat masa pra-nikah. Ada

beberapa program yang di laksanakan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan kematian neonatal.

Program Evidence Summit yang di jalankan oleh AIPI pada tahun 2016-2018 dalam rangka mengurangi kematian ibu dan anak, menemukan beberapa fakta terkait dengan aspek-aspek yang harus di benahi termasuk aspek kesetaraan gender. Dalam hasil laporan Evidence Summit Menjelaskan bahwa Kesetaraan gender dapat memengaruhikesuksesan penerapan “four pillars of safe motherhood” dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu yang cepat dan berkualitas dipengaruhi oleh kewenangan perempuan dalam mengambil keputusan untuk menentukan pelayanan kesehatan terbaik bagi diri dan bayinya. Selain itu, hak untuk mendapatkan peran yang sama bagi perempuan dalam sistem sosial dan ekonomi merupakan faktor penting dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Perempuan dengan peran sosial yang signifikan memberi perhatian yang tinggi terhadap perawatan anaknya. Kepercayaan diri perempuan membentuk kemampuan pengambilan keputusan yang tepat mengenai pelayanan kesehatan reproduksi, antenatal, dan persalinan. Stigma sosial mengenai inferioritas perempuan dalam keluarga dan masyarakat dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan setempat . (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018).

Program lain yang berkaitan dengan penurunan dan pencegahan Angka Kematian Ibu dan Bayi yaitu penelitian Payung tentang pelayanan terpadu pada wanita prakonsepsi sebagai bagian dari penelitian studi longitudinal percepatan perbaikan gizi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan pendekatan pelayanan dan kesehatan ibu anak berkesinambungan. Pelayanan terpadu wanita prakonsepsi sedang dilaksanakan di Kabupaten Banggai dan dilaksanakan sejak Maret 2015. Kegiatan ini melibatkan kelurahan, KUA, kader Posyandu/PKK, serta Puskesmas mulai dari pendaftaran calon pengantin, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian zat gizi mikro serta kursus calon pengantin di KUA (Surat Perjanjian Kerjasama Luwuk, 2016).

Banyak penelitian sebelumnya yang terkait dengan mekanisme pemberian pendidikan pra-nikah atau pra konsepsi terhadap calon pengantin yang berdampak kepada kondisi kesehatan perempuan dan bayi yang di lahirkan begitu pula dengan penyediaan fasilitas yang memadai untuk memfasilitasi pemberian edukasi tentang pentingnya kesehatan jelang nikah.

Penelitian dari Gardiner (2008) menyatakan bahwa penyedia layanan kesehatan harus memiliki pengetahuan tentang prakonsepsi / nutrisi terkait kehamilan dan mengambil inisiatif untuk membahas informasi ini selama konseling prakonsepsi. Wanita usia reproduksi harus dinasihati untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang termasuk buah-buahan dan

sayuran, makanan kaya zat besi dan kalsium, dan makanan yang mengandung protein serta 400 g asam folat setiap hari. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan tentang kemanjuran dan keamanan suplemen makanan dan peran obesitas dalam hasil kelahiran. Konseling prakonsepsi adalah kesempatan yang sempurna bagi penyedia layanan kesehatan untuk membahas pedoman makan sehat, asupan makanan tambahan, dan mempertahankan status berat badan yang sehat. (Gardiner et al., 2008)

Penelitian yang dilakukan oleh Citrakesumasari (2012), mengungkapkan bahwa pelayanan persiapan pernikahan dan rangkaian acara pernikahan bisa digunakan sebagai media untuk menjaring dan mendekatkan calon pengantin untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan di puskesmas serta dan menjadi alat untuk promosi pencegahan anemia gizi dan Kekurangan Energi Kronik (KEK) ibu hamil (Citrakesumasari and Suriah, 2012).

Pendidikan pra-nikah sangat penting untuk di dapatkan sejak dini, penelitian dari Gardner (2016) di Amerika Serikat meneliti tentang kurikulum pendidikan pernikahan sekolah menengah yang dirancang untuk mengajarkan siswa bagaimana mengembangkan hubungan dan perkawinan yang sehat. Studi ini mengevaluasi efektivitas kurikulum *What's Real* ini dengan 206 siswa sekolah menengah yang berada di salah satu kelompok kontrol. Temuan menunjukkan bahwa kurikulum meningkatkan pengetahuan

tentang konsep hubungan yang sehat, berdampak positif pada sikap yang terkait dengan kesediaan siswa untuk terlibat dalam konseling sebelum dan sesudah menikah, dan meningkatkan sikap siswa terhadap penghindaran hidup bersama. (Gardner et al., 2016)

Studi kasus di kabupaten luwuk banggai dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap input, sumber daya manusia yang terlibat adalah petugas kelurahan, petugas KUA, dan petugas kesehatan dipuskesmas, pustu dan polindes dengan penanggungjawab program adalah Dinas Kesehatan bagian Kesga dan Gizi. Penganggaran dana berasal dari dana Dinas Kesehatan. Metode kursus calon pengantin sudah berjalan dengan baik dan dilakukan secara rutin setiap minggu. Sasaran utama dari Program Manajemen Prakonsepsi adalah calon pengantin dan program ini sangat didukung oleh pemerintah. Pada tahap proses, perencanaan dimulai dengan pelaksanaan pembuatan MOU antarsektor dan pelatihan petugas kesehatan. Pengorganisasian dalam Program Manajemen Prakonsepsi sudah berjalan dengan baik. (Hadrayanti et al., 2017)

Bimbingan pra nikah sudah banyak di terapkan di berbagai KUA di Indonesia dengan berbagai macam metode bimbingan. Penelitian tentang bentuk pendidikan pra nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Weleri Semarang menyimpulkan bahwa optimalisasi program pra nikah yang dilaksanakan di KUA tersebut adalah pelaksanaan bimbingan pranikah

dilaksanakan untuk remaja usia nikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, bimbingan Pranikah untuk calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA Dengan memanfaatkan 10 hari sebelum pelaksanaan akad. Apabila pada hari yg sudah ditentukan calon pengantin berhalangan maka masih ada satu kesempatan yaitu bimbingan Pranikah sebelum pelaksanaan akad di KUA. Pihak KUA Weleri juga bekerja sama dengan penghulu atau petugas pemberi bimbingan desa untuk memberikan upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pra nikah di kecamatan Weleri.(Afif, 2018)

Sementara di penelitian lainnya metode pemberian bimbingan pra nikah juga disematkan didalamnya materi yang menyangkut kesetaraan gender, yang di lakukan secara implisit, namun berjalan optimal.(Nur'azizah, 2020)

Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan juga menerapkan pendidikan pra-nikah yang di beri nama "Bimbingan Perkawinan" yang di inisiasi oleh Kementrian Agama Kabupaten Takalar, program ini dibagi ke dalam dua bagian yaitu tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Materi bimbingan yang di berikan berupa bimbingan perkawinan berdasarkan aspek religi, ekonomi dan kesehatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana bentuk materi yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pendidikan calon pengantin yang dilakukan di daerah tersebut ?
2. Bagaimana sistematika pelaksanaan program pendidikan calon pengantin yang ada di kecamatan Polombangkeng Utara, Takalar Sulawesi selatan berdasarkan perspektif gender.?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang dilaksanakan di Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

### **2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk menilai sejauh mana materi yang diberikan selama bimbingan calon pengantin dilaksanakan.

- b. Untuk menilai sejauh mana proses pelaksanaan bimbingan pernikahan di takalar berdasarkan perspektif gender.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian yang di harapkan oleh peneliti meliputi:

##### **1. Manfaat secara Teoritis**

- a. Menjadi acuan untuk pemerintah terkait dengan peningkatan kualitas hidup berumah tangga.
- b. Dapat menjadi dasar bagi peneliti lainnya untuk membuat penelitian lanjutan.
- c. Menjadi pedoman untuk instansi terkait dalam melaksanakan program pendidikan pra-nikah berbasis gender bagi calon pengantin.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Menambah wawasan bagi peneliti dan terutama pembaca tentang pentingnya pendidikan yang berbasis gender bagi calon pengantin.

#### **1.5 Sistematika penelitian**

Penelitian ini peneliti kelompokkan menjadi lima bab, masing-masing bab dibahas dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan dengan yang lain. Sistematika penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Bab dua terdiri dari kajian pustaka dari literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Bab tiga terdiri dari metode penelitian yang akan di pakai dalam penelitian ini. Bab empat berisi hasil dan pembahasan dari pengambilan data yang di lakukan dalam penelitian ini. Bab lima berisi kesimpulan dan saran yang hasilnya di dapatkan selama penelitian berlangsung.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Pra-Nikah**

##### **2.1.1 Pendidikan konseling pra-nikah**

Pendidikan merupakan suatu bagian terpenting untuk sepasang pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, pendidikan ini bermanfaat untuk memeberikan pengetahuan bagi pasangan tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik muali dari aspek agama, ekonomi, kesehatan dan lain-lain. Program ini juga sangat bermanfaat untuk me minimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Konseling pranikah adalah pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah. Konseling pranikah juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pranikah, konseling edukatif pranikah dan terapi pranikah.

Konseling pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Konseling pranikah (premarital

counseling) merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon isteri oleh seorang konselor professional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.(Jannah, 2010)

Yang membuat pernikahan bahagia bukan tingkat kecocokan seseorang dengan pasangan, tetapi seberapa besar kemampuan dan kesediaan seseorang untuk mengatasi ketidakcocokan. Ketidakjelasan antara yang ideal (apa seharusnya) dan yang aktual (apa adanya) memang tidak pernah berujung. Statistik memperlihatkan perlunya menemukan kiat menempuh pernikahan yang sukses. Mengajukan pertanyaan yang tepat kepada pasangan (sebelum menikah) bisa menjadi alternatif solusi melanggengkan perkawinan yang sehat, serasi dan bahagia.(Willis, 2009)

Sementara tujuan dari konseling pra-nikah secara umum, konseling pranikah bertujuan agar individu mempersiapkan dan mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya dalam memasuki jenjang pernikahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta mengatasi hambatan dan kesulitan menghadapi jenjang pernikahan.(Indah Damayanti., 2016)

Secara khusus, tujuan pemberian layanan konseling pranikah ialah untuk membantu individu mempersiapkan diri menuju pernikahan yang meliputi aspek : Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, teman dan masyarakat. Memiliki akhlakul karimah sebagai calon ibu dan calon ayah dan melaksanakan serta memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan (anugerah) dengan yang tidak (musibah) serta mampu meresponnya dengan sikap positif sesuai dengan syariat islam. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan baik fisik maupun psikis. Memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan pasangan maupun orang lain. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.(Jannah, 2010)

Dalam realitasnya ada pasangan calon pengantin yang mengalami sindrom atau kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi dalam pernikahannya, sehingga mereka perlu memperoleh bimbingan terhadap hal-hal yang akan terjadi dalam pernikahan, agar kekhawatiran yang terjadi dalam pernikahannya dapat diminimalisir. Dalam hal ini terdapat juga orang yang merasa bimbang untuk memasuki ke gerbang pernikahan.(Mubasyaroh, 2017)

### **2.1.2 Pendidikan Pra-nikah Berdasarkan Aspek Kesehatan (Preconception care)**

Pendidikan pra- nikah sangat penting untuk mewujudkan pasangan yang ideal dari segala aspek terutama aspek kesehatan. Menurut WHO Perawatan prakonsepsi (Pra- Nikah) adalah penyediaan intervensi biomedis, perilaku dan kesehatan sosial untuk wanita dan pasangan sebelum terjadi konsepsi. Ini bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan mereka, dan mengurangi perilaku dan faktor-faktor individu dan lingkungan yang berkontribusi terhadap hasil kesehatan ibu dan anak yang buruk. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, baik dalam jangka pendek maupun panjang.(WHO, 2013).

Masa prakonsepsi adalah masa dimana sebelum terjadinya kehamilan, yakni pada masa kanak-kanak, remaja dan dewasa. Pada masa prakonsepsi calon ayah dan calon ibu perlu menyiapkan diri agar pada masa kehamilan dan persalinan, bayi yang akan lahir nantinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, persiapan pernikahan untuk melahirkan generasi kedepan yang lebih baik seharusnya mulai dilakukan jauh sebelum masa ini (WHO, 2012).

Wanita prakonsepsi merupakan salah satu periode sebelum memasuki masa konsepsi, masa konsepsi disebut juga dengan pembuahan yakni peristiwa bertemunya sel telur (ovum) dan sperma. Peristiwa ini terjadi di ampula tuba. Pada hari ke 11-14 terjadinya ovulasi dari siklus menstruasi

normal. Hal ini bisa dilihat dari tes kehamilanyang dilakukan. Kebutuhan gizi pada masa ini berbeda dengan masa anak-anak, remaja, ataupun lanjut usia(WHO, 2012).

Manfaat dari program pendidikan pra-konsepsi ini sendiri sangat banyak terutama bagi kaum wanita dan anak-anak dalam menjaga kesehatan mereka. Program preconception care telah banyak di aplikasikan ke seluruh dunia Penelitian dari Lassi (2014) menyatakan periode prakonsepsi memberikan kesempatan untuk melakukan intervensi lebih awal untuk mengoptimalkan kesehatan calon ibu (dan ayah) dan untuk mencegah paparan berbahaya dari mempengaruhi perkembangan janin.(Lassi et al., 2014)

Namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang di temui, penelitian gossesns (2018) mengatakan hambatan lebih banyak dilaporkan pada fasilitator. Ini terletak di tingkat penyedia (sikap yang tidak menguntungkan dan kurangnya pengetahuan tentang perawatan prakonsepsi, tidak bekerja di bidang kebidanan dan ginekologi, kurangnya kejelasan tentang tanggung jawab untuk menyediakan perawatan prakonsepsi) dan tingkat klien (tidak menghubungi penyedia layanan kesehatan di prakonsepsi tersebut. panggung, sikap negatif, dan kurangnya pengetahuan tentang perawatan prakonsepsi). Sumber daya yang terbatas

(kurangnya waktu, alat, pedoman, dan penggantian) sering dilaporkan di tingkat organisasi dan masyarakat.(Goossens et al., 2018)

Banyak penelitian yang berkaitan dengan program pelayanan pra konsepsi yang di lakukan di seluruh dunia, dalam penelitian barker (2018) menjelaskan manfaat dari intervensi terhadap proses pemberian edukasi pra nikah dapat menghasilkan akan membutuhkan dukungan dari gerakan sosial yang menetapkan pentingnya bagi kesehatan generasi berikutnya, menekankan tanggung jawab masyarakat, dan membutuhkan kepemimpinan lokal, nasional, dan internasional yang kuat. Kekuatan gerakan sosial ini, dan kapasitas untuk memberikan nutrisi yang efektif dan intervensi perilaku, dapat ditingkatkan melalui negosiasi yang dilakukan secara hati-hati dengan kepentingan komersial.(Barker et al., 2018)

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Gender**

Gender diartikan sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan. Istilah gender berbeda dengan sex. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sedangkan istilah sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Istilah bsex lebih banyak mengarah pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis

lainnya. Sementara itu, gender lebih mengarah pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis lainnya.

Dalam kamus Inggris-Indonesia, disebutkan bahwa kata gender berasal dari bahasa Inggris gender yang berarti “jenis kelamin”. Arti ini rancu, karena dengan demikian gender disamakan dengan sex yang berarti “jenis kelamin”. Kamus Webster menyebutkan bahwa gender adalah “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”. Sedangkan dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Mansour Fakih, bahwa gender adalah “suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Mansour Fakih dalam buku yang lain mengadopsi pendapat Oakley yang mengatakan gender adalah behavioral differences antara laki-laki dan perempuan yang social constructed, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh baik kaum laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. (Fakih, 2008)

Pandangan ini didukung oleh Zaitunah bahwa gender “merupakan sebuah konstruksi sosial yang bersifat relatif, tidak berlaku umum atau

universal". Penggunaan kata seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sehingga kemudian dengan sadar atau tidak, aspek gender tersebut membawa konsekuensi logis bila ternyata berperan secara tidak adil. (Subhan, 2012)

Kata gender dan seks atau jenis kelamin harus dibedakan. Jenis kelamin menunjuk pada pembagian dua kelamin yang berbeda dan merupakan penentuan secara biologis. Jenis kelamin secara permanen tidak akan berubah. Adapun gender adalah sesuatu yang sifatnya melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Maka gender bukanlah suatu given atau kodrat yang tidak bisa dipertukarkan, tetapi merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Konstruk gender bukan melihat manusia dari sisi biologis tetapi lebih kepada konstruksi dari struktur sosial dan budaya. Secara umum, gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, sedangkan seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi anatomi biologi.

Simbol dalam kehidupan sangat memengaruhi keberadaan gender. Laki-laki diidentikkan dengan kejantanan (masculinity), sedangkan

perempuan diidentikkan dengan kewanitaan (femininity). Persepsi yang dilekatkan pada perempuan adalah sebagai makhluk lemah lembut, cantik, manja, penakut, mudah terbawa emosi dan penuh kasih sayang. Sebaliknya laki-laki adalah rasional, bertubuh kuat, perkasa, pemberani, tegas dan agresif. Anggapan-anggapan budaya seperti ini dengan sendirinya memberikan peran yang berbeda dan lebih luas kepada laki-laki, karena laki-laki mendapat status nilai sosial yang relatif tinggi dibandingkan perempuan.

Sedangkan yang di maksud dengan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan (politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, dan lainnya), juga kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

Beberapa teori mengenai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan yang umumnya dikemukakan oleh para feminis kontemporer didasarkan pada pertanyaan mendasar “Apa peran perempuan?”. Secara esensial, ada empat jawaban untuk pertanyaan tersebut. Pertama, bahwa posisi dan pengalaman perempuan dari kebanyakan situasi berbeda dari yang dialami laki-laki dalam situasi ini. Kedua, posisi perempuan dalam kebanyakan situasi tak hanya berbeda, tetapi juga kurang menguntungkan atau tak setara dibandingkan dengan laki-laki.

Ketiga, bahwa situasi perempuan harus pula dipahami dari sudut hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan perempuan. Perempuan “ditindas”, dalam arti dikekang. Disubordinasikan, dibentuk, dan digunakan serta disalahgunakan oleh laki-laki. Keempat, perempuan mengalami perbedaan, ketimpangan dan berbagai penindasan berdasarkan posisi total mereka dalam susunan stratifikasi atau faktor penindasan dan hak istimewa berdasar kelas, ras, etnisitas, umur, status perkawinan, dan posisi global. Masing-masing berbagai tipe teori feminis itu dapat digolongkan sebagai teori perbedaan gender, atau teori ketimpangan gender, atau teori penindasan gender, atau teori penindasan struktural.

Ada pula keadilan gender, yaitu suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga tidak ada marginalisasi, subordinasi, pembakuan peran, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yakni, marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi); subordinasi (anggapan tidak penting dalam keputusan publik); pembentukan stereotipe

(pelabelan negatif); violence (kekerasan); burden (beban ganda), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Manifestasi ketidaksetaraan gender telah terjadi di berbagai tingkatan, bidang dan mengakar dari mulai keyakinan di setiap masing-masing orang, keluarga, hingga tingkat negara yang bersifat global. Salah satunya ketidaksetaraan gender yang berkembang dalam masyarakat adalah bidang pendidikan tidak terkecuali pendidikan pra-nikah.

### **2.3 Pengertian Evaluasi Program dan Penelitian Kualitatif**

Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti ujian. Disebutkan oleh Suharsimi Arikunto dalam Evaluasi Program Pendidikan, bahwa disebutkan dalam kamus Oxford, evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Pandangan tentang fungsi evaluasi dikemukakan oleh Edward Sallis dalam Total Quality Management in Education bahwa:

The function of evaluation at each stage is different. Too often evaluation is seen as having prevention as its main purpose. It is a means of discovering what went right and wrong and using the information to improve things next time round, which in education usually means next

year. Preventing things from happening agains is a perfectly valid use of evaluation, but it has a major drawback.(Sallis, 2014)

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diartikan bahwa fungsi evaluasi pada masing-masing tahap berbeda satu sama lainnya. Evaluasi sering dilihat sebagai sebuah upaya pencegahan. Ia bertujuan untuk menemukan apa yang benar dan apa yang salah, serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pencegahan dari kesalahan agar tidak terulang kembali merupakan fungsi evaluasi yang valid, namun ia memiliki kekurangan yang mendasar. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Untuk mengetahui proses pendidikan telah berjalan sesuai program, serta telah mencapai tujuan secara efisien dan efektif, atau proses

pendidikan tersebut tidak berjalan sesuai program dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan, maka untuk mengetahui hal tersebut diperlukan kegiatan yang disebut evaluasi. Dalam pendidikan Islam evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran.

Menurut pengertian secara umum, program dapat diartikan sebagai rencana. Apabila program langsung dikaitkan dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Program sekolah merupakan suatu pedoman, petunjuk arah, dan penggerak yang menentukan semua aktivitas yang ada di sekolah. Bermutu atau tidaknya suatu kegiatan sekolah sangat tergantung pada program yang dibuat.

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Evaluasi

program juga merupakan upaya untuk mengetahui efektivitas komponen program dalam mendukung pencapaian tujuan program.

Evaluasi program dikembangkan dari evaluasi secara umum, yaitu proses pengumpulan data, analisis, dan digunakannya untuk pengambilan keputusan terhadap objek ataupun subyek yang dievaluasi. Selain itu evaluasi program juga dikembangkan dari berbagai pilar manajemen atau pengelolaan yang lebih spesifik, yaitu pilar monitoring, evaluasi, dan kontrol. Dalam dunia pendidikan, evaluasi program dapat diartikan dengan kegiatan supervisi dan supervisi sekolah dapat diartikan sebagai evaluasi program.

Model evaluasi ialah model desain evaluasi yang dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap pembuatannya. Kaufman dan Thomas sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto membedakan model evaluasi menjadi tujuh, yaitu:

a) Goal Orinted Evaluation Model

Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus menerus, mencek seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program.

b) Goal Free Evaluation Model

Yang perlu diperhatikan dalam program ini adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilanpenampilan yang terjadi, baik hal-hal positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (yang sebetulnya tidak diharapkan).

#### c) Formatif-Summatif Evaluation Model

Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif).

#### d) Countenance Evaluation Model

Model ini dikembangkan oleh Stake. Model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu (1) deskripsi (description) dan (2) pertimbangan (judgments); serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu (1) anteseden (antecedents/context), (2) transaksi (transaction/process), dan (3) keluaran (output-outcomes).

#### e) CSE-UCLA Evaluation Model

Ciri dari model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak.

#### f) CIPP Evaluation Model

Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk. di Ohio State University. CIPP merupakan singkatan, yaitu: Context evaluation (evaluasi terhadap konteks), Input evaluation (evaluasi terhadap masukan), Process evaluation (evaluasi terhadap proses), Product evaluation (evaluasi terhadap hasil). Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Jika tim evaluator sudah menentukan model CIPP sebagai model yang akan digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan maka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya. (Arikunto, 2006)

Gilbert Sax memberikan arahan kepada evaluator tentang bagaimana mempelajari tiap-tiap komponen yang ada dalam setiap program yang dievaluasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Model ini sekarang disempurnakan dengan satu komponen O, singkatan dari outcome (s) sehingga menjadi model CIPPO. Model CIPP hanya berhenti pada mengukur output (product), sedangkan CIPPO sampai pada implementasi dari product.

#### g) Discrepancy Model

Model yang dikembangkan oleh Malcolm Probus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator

mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen.(Arikunto, 2006)

Dapat disimpulkan bahwa Evaluasi program pendidikan tidak lain adalah supervisi pendidikan pendidikan dalam pengertian khusus, tertuju pada lembaga secara keseluruhan. Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu : a) menghentikan program jika dianggap tidak bermanfaat, b) merevisi program jika ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan, c) melanjutkan program jika sudah sesuai dengan harapan, d) menyebarluaskan program jika dinilai sangat baik dan perlu diterapkan di tempat dan waktu yang lain. Oleh karena itu, mengacu kepada pendapat di atas maka evaluasi program pendidikan dipandang sangat penting, karena sebagai tolok ukur keberhasilan suatu program yang dilakukan. Jika terdapat kekurangan, maka kekurangan itu akan diperbaiki di masa yang akan datang. Jika program itu baik dan bermanfaat, maka program tersebut dapat dilanjutkan dan disebarluaskan di tempat lain.

Model evaluasi program dalam penelitian ini akan di padukan dengan metode penelitian kualitatif. Pengertian metode kualitatif sendiri adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif dapat di gunakan untuk meneliti

kehidupan masyarakat, sejarah, fungsionalisasi organisasi, gerakan social atau hubungan kekerabatan.(Strauss and Corbin, 1997).

Sementara pengertian kualitatif yang lainnya menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang di amati.(Bogdan and Taylor, 1992). Menurut Rurchan (1992) dalam Basrowi (2008) melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.(Basrowi, 2008)

### **2.3 Formatif-Summatif Evaluation Model**

Dalam penelitian ini peneliti memakai model formatif – summatif, hal ini dikarenakan program yang akan di teliti sedang di aplikasikan di lokasi penelitan dalam hal ini lokasi terdapat di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Pengertian evaluasi formatif sendiri adalah suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu produk atau program tertentu sedang di kembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan pembaruan. Menurut Sujana (1990:156) telah dijelaskan Tes formatif dilaksanakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar-mengajar, khususnya pada akhir pengajaran.(Sujana, 1990)

Sedangkan Weston, McAlpine dan Bordonaro (1995) dalam Badrujaman (2009) menjelaskan bahwa tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk memastikan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan untuk melakukan perbaikan suatu produk atau program.(Badrujaman, 2009)

Hal ini senada dengan Worthen dan Sanders (1997) dalam Badrujaman (2009) yang menyatakan bahwa evaluasi formatif dilakukan untuk memberikan informasi evaluatif yang bermanfaat untuk memperbaiki suatu program. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kegunaan evaluasi formatif, yaitu kontrol dan waktu. Bila saran perbaikan akan dijalankan, maka evaluasi formatif diperlukan sebagai kontrol. Informasi yang diberikan menjadi jaminan apakah kelemahan dapat diperbaiki. Apabila informasi mengenai kelemahan tersebut terlambat sampai kepada pengambilan keputusan, maka evaluasi bersifat sia-sia.(Badrujaman, 2009)

Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif tersebut adalah mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahuinya hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar, pengambil keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program. Evaluasi formatif dapat menanggapi program

dalam konteks yang dinamis, dan berusaha untuk memperbaiki keadaan yang berantakan dari kerumitan yang merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan dari berbagai bentuk program dalam lingkungan kebijakan yang berubah-ubah. Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program baik pada konteks organisasi, personil, struktur, dan prosedur menjadi fokus evaluasi formatif.

#### **2.4 Tinjauan Tentang Implementasi**

Implementasi sebagai suatu konsep tindak lanjut pelaksanaan kegiatan cukup menarik untuk dikaji oleh cabang cabang ilmu. Hal ini semakin mendorong perkembangan konsep implementasi itu sendiri, disamping itu juga menyadari bahwa dalam mempelajari implementasi sebagai suatu konsep akan dapat memberikan kemajuan dalam upaya-upaya pencapaian tujuan yang telah diputuskan (Novayanti, 2013)

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan

kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah (Novayanti, 2013)

Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para mobiliastor atau para aparat yang berkepentingan. Suatu Kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan- tujuan atau target-target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan output atau outcomes bagi masyarakat. Proses menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan (Novayanti, 2013).

George C Edwards (1980) dalam Saputri (2015), menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu:

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group)

sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

#### b. Sumber Daya

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

#### c. Disposisi atau Sikap-Sikap

Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### d. Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (Standart Operating Procedure = SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Mengamati model implementasi George C Edwards III, tentang kontens dan konteks kebijakan, bahwa isi/kontens kebijakan harus disesuaikan dengan konteksnya yakni siapa SDM yang dituju, bagaimana persepsi dan tanggapan yang diberikan dan bagaimana sikap dan tanggapan yang diberikan birokratnya dalam mencapai kesepakatan dalam implementasi kebijakan yang ada sehingga akan mencapai hasil yang maksimal. Tujuan yang hendak dicapai merupakan target akhir dari implementasi, dan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

Model implementasi kebijakan tersebut menggambarkan, bahwa proses implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif bila dipengaruhi oleh beberapa variabel. (Karnawati, 2014).

Sehubungan dengan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu program, Van Meter dan Van Horn (dalam Saputri, 2015) mengemukakan enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standard dan sasaran kebijakan kabur, maka akan

terjadi multiimplementasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

## 2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas Dalam implementasi. Program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk ini diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

## 4. Karakteristik agen pelaksana

Agar pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

## 5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau

menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

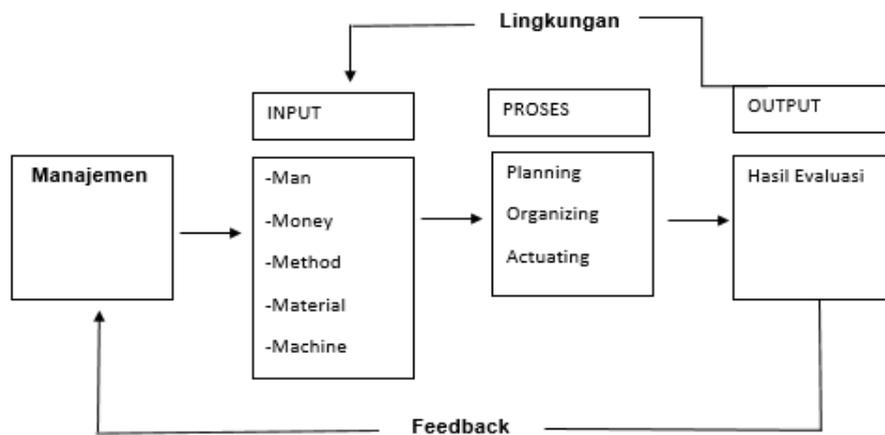
### 1. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

## 2.6 Kerangka Teori

### 2.6.1 Teori Donabedian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang di kembangkan oleh Donabedian untuk penilaian kualitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu melalui pendekatan struktur atau input (struktur ), proses dan hasil ( output ) (Donabedian, 1968).

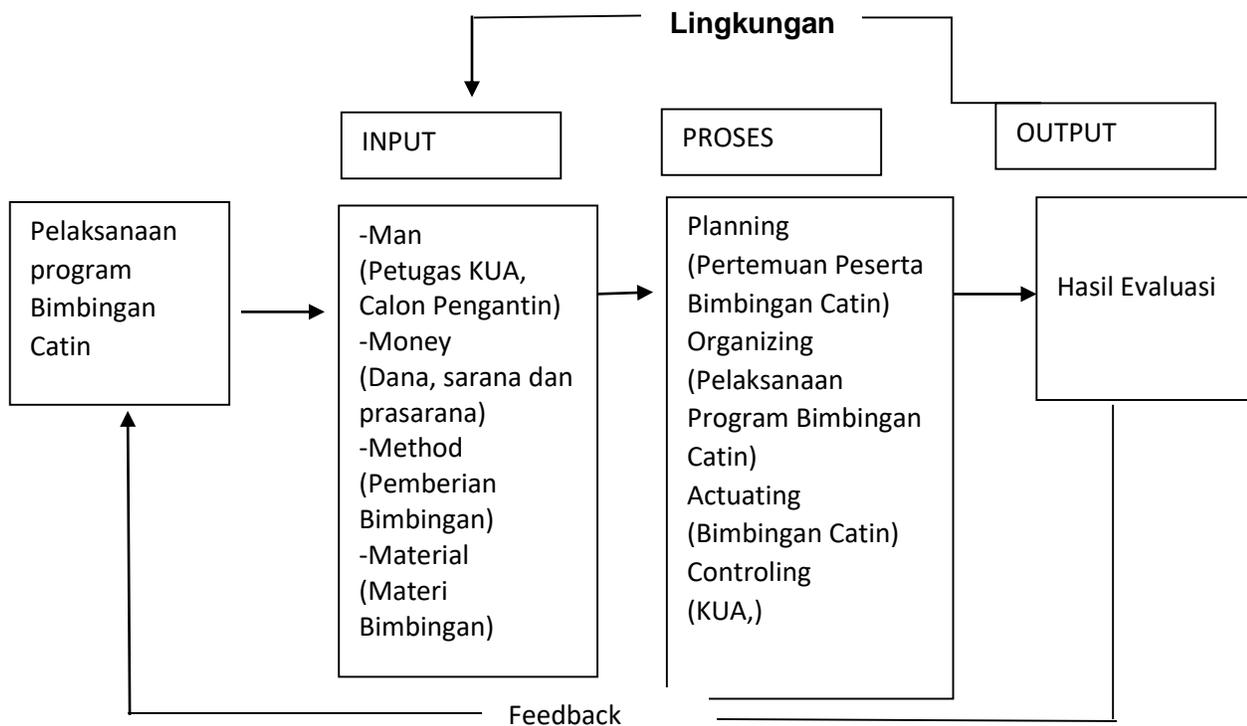


Gambar : Kerangka Teoritis Donabedian (1968)

Teori ini akan peneliti aplikasikan kedalam proses evaluasi pendidikan calon pengantin dengan indikator melalui 3 pendekatan struktur, input dan output sehingga pada akhirnya hasil evaluasi berhasil di dapatkan.

## 2.7 Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka teoritis penjelasan diatas maka peneliti membuat model kerangka Konsep sebagai berikut:



2.2 Gambar Kerangka Konsep penelitian tentang evaluasi program pendidikan calon pengantin

## 2.8 Definisi Konsep

Berdasarkan kerangka konsep, maka dapat disusun definisi konsep pada variable penelitian sebagai berikut.

1. Indikator input adalah kumpulan bagian atau elemen yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan program Pelaksanaan bimbingan pra-nikah. Adapun yang dibutuhkan yaitu:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah pelaksana tugas dari proses pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang diselenggarakan, seperti pegawai administrasi KUA, petugas pemberi bimbingan, dan para catin itu sendiri.

b. Sarana dan pra-sarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang tersedia di KUA dalam mendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan calon pengantin.

c. Metode

Metode yang dimaksud adalah bagaimana cara para petugas pemberi bimbingan KUA memberikan materi untuk para calon pengantin yang mendaftar untuk menikah.

d. Materi

Materi yang dimaksud adalah materi yang diberikan oleh petugas pemberi bimbingan bimbingan calon pengantin kepada para calon pengantin, isi dari materi tersebut berupa ajaran-ajaran atau tata laksana dari proses bimbingan calon pengantin tersebut.